

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA LASIAI

Darmawati¹, Irmawati², Wiwik Sulastri Oktavia³

¹Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: oppowati76@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: mawatialkasi95@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelisik upaya pemerintah desa dalam mewujudkan program pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur. Tipe penelitian adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian bahwa upaya pemerintah desa dalam mewujudkan program pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur sudah terlaksana, melalui Percepatan Realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dibuktikan dengan melakukan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pertiga bulan, begitupun dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) penyalurannya dilakukan setiap bulan. Demikian halnya dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah disalurkan oleh Pemerintah Desa per bulan. Percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan sudah terlaksana sesuai bantuan yang terlaksana di Desa Lasiai diantaranya Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Percepatan program vaksinasi sudah terlaksana dengan cara pemerintah desa dan pihak kesehatan turun langsung ke lapangan untuk menginformasikan dan memberikan vaksinasi tahap 2 Covid-19 Desa Lasiai dimana sebagian besar penduduk Desa Lasiai sudah melakukan vaksinasi, sementara sebagian lagi belum divaksinasi karena melaut (nelayan) dan sebagian merasa khawatir. Sedangkan Program padat karya kementerian/lembaga (K/L) belum terlaksana di Desa Lasiai baik itu program padat karya dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum ada warga yang menerima di Desa Lasiai.

Kata Kunci: Pemulihan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Peran pemerintah desa dibutuhkan untuk memantau keadaan di setiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang khususnya dana desa. Olehnya itu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memfokuskan pengalokasian dana desa pada 2021 untuk pemulihan ekonomi desa pascapandemi. Prioritas penggunaan dana desa pada 2021 mendatang

tersebut merujuk arahan Presiden Joko Widodo dan Peraturan Menteri (Permen) Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai telah menyalurkan dana desa Tahap III salah satu dari 4 desa yaitu Desa Lasiai. Penyaluran dana desa untuk tahap ketiga ini merupakan *batch* terakhir penyaluran dana desa di Kabupaten Sinjai tahun 2020, sehingga 67 desa di Sinjai seluruhnya tuntas. Dengan berjangkitnya pandemi global Covid-19 yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di Indonesia, penggunaan dana desa tahun 2020 diutamakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan program stimulus diantaranya untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa.

Kebijakan ini paling berdampak pada salah satu desa di Sinjai mengingat pada tahun 2018 terdapat kasus penyelewengan dana desa oleh oknum Kades dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai saat ini. Jadi kebijakan ini menjadi pembelajaran kepada seluruh desa, bahwa dana desa tercatat oleh sistem secara transparan dan akuntabel sehingga harus benar-benar dikelola dengan transparan dan akuntabel pula. Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel tersebut dibuktikan dengan proses rekonsiliasi antara desa dengan Pemkab Sinjai. Proses rekonsiliasi tersebut paling lambat harus diselesaikan pada tanggal 30 November 2020 mendatang. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Desa dan masyarakat diharapkan turut serta mengawasi agar *output* atau *hasil* yang diamanatkan dalam penyaluran dana desa benar-benar tercapai dan memberikan dampak perbaikan ekonomi di desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Alasan penulis memilih judul upaya pemerintah desa dalam mewujudkan program pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur, sebab penulis ingin mengetahui bagaimana langkah atau keputusan yang dibuat pemerintah desa dalam mewujudkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, sementara kita ketahui bahwa program ini terbilang baru sehingga dalam menjalankannya perlu disposisi yang baik dari Kepala Desa Lasiai. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pemerintahan desa harus selalu memantau masyarakat dengan potensi sumber daya yang ada di desa perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Tenaga kerja yang produktif perlu dibimbing agar bisa memiliki penghasilan yang meningkatkan kesejahteraan hidup, adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu melakukan pembuatan karya, membangun infrastruktur jalan dan memberikan modal.

KAJIAN TEORI

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak krisis ekonomi dapat diawali dengan membuat perencanaan dan strategi pembangunan yang tepat (Arsyad, dalam Ali Nasrun, 2020). Dalam perencanaan, tahap pertama yang harus ditetapkan adalah prioritas pembangunan. Harus fokus untuk menyelesaikan masalah utama. Kedua, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan keadaan aktual. Ketiga, menetapkan strategi pelaksanaannya. Adanya kekhasan pada setiap daerah mendorong adanya konsep pembangunan daerah. Untuk itu, perlu terlebih dahulu diketahui mengenai karakteristik suatu daerah. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung kepada apa yang dimiliki dan keadaan daerah, yaitu antara lain: sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, kewirausahaan, infrastruktur, pasar, dan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitiannya Ali Nasrun (2020) menyebutkan bahwa ada beberapa teori pembangunan daerah yang relevan untuk menanggulangi krisis ekonomi di tingkat daerah.

1. *Economic base theory* merupakan salah satu teori yang mengusulkan pembangunan daerah berdasarkan kepada apa sektor usaha atau produk yang paling banyak diminta oleh masyarakat dari luar daerah. Produksi didasari dengan potensi sumber daya yang ada di lokal.
2. Teori lokasi. Teori ini memperhitungkan suatu lokasi yang paling ekonomis untuk menjadi lokasi industri.
3. Teori *central place theory*, yaitu suatu tempat sentral ekonomi yang didukung oleh beberapa tempat di sekitarnya. Interaksi antar daerah akan menjadi suatu kekuatan ekonomi setempat.
4. Teori model daya tarik. Para pelaku ekonomi akan berupaya memperbaiki diri jika ada subsidi dan insentif dari pemerintah. Dalam paradigma baru pembangunan daerah, diyakini bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan kepada mekanisme pasar. Peran pemerintah sangat sentral dan menentukan dalam pergerakan perekonomian daerah, terutama untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.
5. Teori *spread effects* oleh Myrdal dan teori *trickling down effects* oleh Hirshman dapat berjalan dengan baik. Pembangunan daerah harus secara maksimal mendayagunakan potensi dan peluang usaha yang ada di daerah, sebagai strategi pembangunan berbasis lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. teknik analisis data penelitian ini merujuk pada teori Miles dan Huberman (2007) dimulai dengan Langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Percepatan Realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos)

Percepatan realisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan upaya yang mencakup Program Keluarga Harapan, penyaluran bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Percepatan realisasi program perlindungan sosial di Desa Lasiai meringankan beban ekonomi masyarakat dan realisasi program perlindungan sosial ini selain bisa mengurangi beban masyarakat, juga memacu peningkatan produktivitas masyarakat. Program perlindungan sosial tersebut untuk di Desa Lasiai sendiri sudah terlaksana dan sampai sekarang masih berlanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan bantuan sosial yang ada di Desa Lasiai sudah terlaksana dan cukup luar biasa sebab banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah akan tetapi pendataan belum terangkum secara keseluruhan di luar dari data yang menerima bantuan di luar dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga pemerintah desa bekerja keras untuk melakukan pendataan agar bantuan yang disalurkan bisa tepat sasaran.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam percepatan realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) sudah terlaksana dibuktikan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dengan melakukan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pertiga bulan, begitupun dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) penyalurannya dilakukan setiap bulan. Demikian halnya dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah disalurkan oleh Pemerintah Desa per bulan.

Percepatan Penganggaran dan Realisasi Bantuan

Percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan merupakan percepatan penganggaran dan realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang ditargetkan tersalur pada Maret 2021. BPUM merupakan bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat, sementara kewenangan desa hanya melakukan pemeriksaan data supaya tidak terjadi data double karena yang berhak menerima BPUM hanya warga yang memiliki usaha. Mengenai dana yang diterima setiap bantuan, dari hasil observasi diketahui bahwa program yang berjalan terdiri dari Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam Percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan sudah terlaksana sesuai bantuan yang terlaksana di Desa Lasiai diantaranya Program Keluarga Harapan Rp. 3.000.000 per tahun, Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp. 300.000 per tiga bulan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Rp. 300.000 per tiga bulan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 200.000 per bulan.

Program Padat Karya Kementerian/Lembaga (K/L)

Program padat karya kementerian/lembaga (K/L) merupakan program padat karya dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terkhusus

di Desa Lasiai terkait program padat karya Kementerian/Lembaga (K/L) belum ada warga yang mendapatkan baik itu program padat karya dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program padat karya kementerian/lembaga (K/L) baik melalui program pada karya dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum pernah ada di Desa Lasiai.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program padat karya kementerian/lembaga (K/L) belum terlaksana di Desa Lasiai baik itu program padat karya dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum ada warga yang menerima di Desa Lasiai.

Percepatan Program Vaksinasi

Percepatan program vaksinasi sudah terlaksana di Desa Lasiai dimana pemerintah desa dan petugas kesehatan melakukan sosialisasi kepada warga untuk melakukan vaksinasi. berdasarkan hasil wawancara diperoleh uraian bahwa percepatan program vaksinasi di Desa Lasiai telah terlaksana dengan upaya yaitu bersama pemerintah desa dengan petugas puskesmas memberikan informasi kepada warga masyarakat dengan turun langsung ke permukiman penduduk untuk memberikan pemahaman terkait pemberian vaksinasi. Pemerintah Desa Lasiai melakukan pemetaan terhadap masyarakat yang memiliki mobilitas dan interaksi yang tinggi dengan berbagai lapisan masyarakat karena memiliki potensi besar dalam terkontaminasi COVID-19. Selanjutnya petugas menyiapkan vaksinator untuk melakukan vaksinisasi kepada masyarakat yang ditargetkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa upaya pemerintah desa dalam mewujudkan program pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur sudah terlaksana, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Percepatan realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dibuktikan dengan melakukan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) pertiga bulan, begitupun dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) penyalurannya dilakukan setiap bulan. Demikian halnya dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah disalurkan oleh Pemerintah Desa per bulan.
2. Percepatan penganggaran dan realisasi Bantuan sudah terlaksana sesuai bantuan yang terlaksana di Desa Lasiai diantaranya Program Keluarga Harapan Rp. 3.000.000 per tahun, Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp. 300.000 per tiga bulan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Rp. 300.000 per tiga bulan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 200.000 per bulan.
3. Program padat karya kementerian/lembaga (K/L) belum terlaksana di Desa Lasiai baik itu program padat karya dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum ada warga yang menerima di Desa Lasiai

4. Percepatan program vaksinasi sudah terlaksana dengan cara pemerintah desa dan pihak kesehatan turun langsung ke lapangan untuk menginformasikan dan memberikan vaksinasi Tahap 2 Covid-19 Desa Lasiai dimana sebagian besar penduduk Desa Lasiai sudah melakukan vaksinasi, sementara sebagian lagi belum divaksinasi karena melaut (nelayan) dan sebagian merasa khawatir.

DAFTAR PUSTAKA

- Eni Surasih, Maria. 2006. *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.
- Iwan Victor Leonardo & Muhammad Meirizky Ikhsan. 2020. *Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mari Bersama-sama Menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik*, Artikel DJKN, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html> pada tanggal 28 Juni 2021.
- Makarno, Kasim. 2017. Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, jurnali Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, diakses melalui <https://journal.uwgm.ac.id> pada tanggal 14 Juni 2021.
- Media Nasional Kontan. 2021. *Ini dia 5 program PEN untuk unkit perekonomian di kuartal I-2021*, diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-5-program-pen-untuk-ungkit-perekonomian-di-kuartal-i-2021> pada tanggal 28 Juni 2021.
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mudawat, Muhamad Fiiil. 2021. *Berita Lokal: Pada Karya Tunai Desa (PKTD) 2021 sesuai Permendes 13 tahun 2020*, blog format administrasi desa diakses melalui <http://www.batajawa.id/index.php/artikel/2020/11/26/padat-karya-tunai-desa-pktd-2021-sesuai-permendes-13-tahun-2020> pada 15 Juni 2021.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya, Edisi 5*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nasrun, Ali. 2020. *Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu*, Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020, ISBN: 978-602-53460-5-7.
- Sari, Wilda. 2020. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*, skripsi Makassar: Unismuh.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaya. 2008. *Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo